

Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.



* * *

ASAS KETERPADUAN

SEBAGAI DASAR KONSEP INTEGRASI PENGAWASAN

Terhadap **PERTAMBANGAN
MINERAL & BATUBARA**

* * *

RINGKASAN

Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap tambang batubara dapat dilihat dari aspek substansi, kewenangan dan prosedur. Aspek substansi berkaitan dengan perbuatan-perbuatan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap izin lingkungan. Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap tambang batubara yang secara substansi berkaitan dengan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap peraturan perundang-undangan dan ketaatan terhadap izin lingkungan, adalah pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UUPPLH. Dengan demikian secara prosedur, pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap tambang batubara harus tunduk terhadap tata cara pengawasan sebagaimana diatur dalam UUPPLH.

Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pertambangan batubara yang diatur secara sektoral dalam UU Minerba telah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang konsep pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Sebagai hukum lingkungan positif yang bersifat komprehensif dan terpadu bagi seluruh sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, maka UUPPLH menjadi rujukan bagi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, termasuk UU Minerba. Dalam kedudukan sebagai *umbrella act* tersebut, maka UUPPLH perlu mengatur secara jelas dan terpadu setiap materi muatan yang diatur di dalamnya, termasuk materi muatan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi merupakan implementasi dari asas keterpaduan yang menjadi salah satu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengaturan pengawasan yang terintegrasi yang penulis konsepskan, diharapkan dapat menjadi daya pendorong terwujudnya kerangka kebijakan pengelolaan batubara, termasuk di dalamnya aspek pengawasan, secara komprehensif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan generasi akan datang. []

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II: KERANGKA KONSEPTUAL	21
A. Konsep Pengawasan	21
B. Konsep Tanggung Jawab Negara	34
C. Konsep Perizinan	41
D. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	46
E. Konsep Integrasi	51
BAB III: KEWENANGAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP TAMBANG BATUBARA DALAM PERSPEKTIF UU MINERBA DAN UUPPLH	53
A. Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam	53
B. Makna Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam UUPPLH dan UU Minerba	65
C. Konstruksi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam UUPPLH dan UU Minerba	73
BAB IV: PERIZINAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP TAMBANG BATUBARA	81
A. Hakikat Izin Lingkungan Sebagai Dasar Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Tambang Batubara	81
1. Izin Lingkungan Sebagai Syarat Terbitnya Izin Usaha Pertambangan	81
2. Izin Usaha Pertambangan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Tambang Batu bara	91

BAB V: MAKNA PENGAWASAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP TAMBANG BATUBARA

101

BAB VI: INTEGRASI PENGATURAN PENGAWASAN BERBASIS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

117

A. Paradigma Konsep Integrasi Pengaturan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Tambang Batubara

117

1. *Undang-Undang Lingkungan Hidup Sebagai Undang-Undang Payung bagi Peraturan Sektor yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup.*

117

2. *Asas Keterpaduan sebagai Landasan Konsep Integrasi Pengaturan Pengawasan Pengelolaan Tambang Batubara*

122

BAB VII: REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP TAMBANG BATUBARA

A. Integrasi Pengaturan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Tambang Batubara

143

B. Integrasi Kewenangan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Tambang Batubara

144

C. Pengaturan Pengawasan yang Beraspek Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

156

174

BAB VIII: PARAMETER KEBIJAKAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP TAMBANG BATUBARA BERBASIS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

209

**DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PENULIS**

216

iv

242

ASAS KETERPADUAN

SEBAGAI DASAR KONSEP INTEGRASI PENGAWASAN

Terhadap **PERTAMBANGAN MINERAL & BATUBARA**

Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap per-tambangan batubara yang diatur secara sektoral dalam UU Minerba telah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang konsep pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Sebagai hukum lingkungan positif yang bersifat komprehensif dan terpadu bagi seluruh sistem perlin-dungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, maka UUPPLH menjadi rujukan bagi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, termasuk UU Minerba. Dalam kedudukan sebagai umbrella act tersebut, maka UUPPLH perlu mengatur secara jelas dan terpadu setiap materi muatan yang diatur di dalamnya, termasuk materi muatan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi merupakan implementasi dari asas keterpaduan yang menjadi salah satu asas dalam perlingdung-an dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penak!ta
Publisher

Jl. Semangat Baru Komp. Garuda Sakti
RT 04 RW IX Sidomulyo Selatan
Landasan Ulin Timur Banjarbaru
HP: 085249344519

ISBN 978 - 602 - 50721 - 8 - 5



9 786025 072185